

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peranan

1. Pengertian Peranan

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”¹ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus

¹ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 62

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4, h. 854

berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.³

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku *Sosiologi Suatu Pengantar* dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.⁴

Sering orang mempunyai pelbagai status sekaligus dan akibatnya pelbagai peranan. Misalnya, seorang ulama dapat merangkap status suami, pengusaha, ketua organisasi. Tiap status mempertemukan dia dengan orang yang berlainan. Selaku ulama ia melayani umat yang beragama, selaku suami ia mempunyai relasi khusus dengan istri dan anak-anaknya, selaku pengusaha ia berhubungan dengan para pelanggan dan wakil-wakil dunia bisnis, dan selaku ketua organisasi dengan para anggotanya. Status-status yang dimiliki seseorang secara merangkap disebut dengan “status set” atau seperangkat status.⁵

³ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Loc.cit.*

⁴ *Ibid.*, h. 213

⁵ Karel J. Veeger, et.al., *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 60

Relasi-relasi yang timbul dari suatu “status set” mempunyai coraknya sendiri dan mengandung harapan-harapan sendiri. Perilaku sebagai ulama berbeda dari perilaku sebagai suami. Robert Merton memakai istilah *multiple roles* (banyak peranan yang berlain-lainan) untuk semua peranan yang timbul dari “status set.” Misalnya, ulama tadi mempunyai bermacam-macam peranan yang berkaitan dengan banyaknya status. Masing-masing status dalam perangkat mengakibatkan peranan-peranan tertentu, yang untuk masing-masing status dinamakan *role-set*. *Role-set* sebagai ulama mencakup peranan-peranan seperti: mengurus masjid, memimpin ibadat, berdakwah, menjadi panutan dan penasehat masyarakat. Sebagai suami ia berperan sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah, pendidik anak-anaknya, dan lain-lain. Tiap-tiap kategori orang dengan siapa ia berinteraksi dalam peranan-peranan itu mengharapkan sesuatu lain dari dia. Analisis sosial, yang bertitik tolak dari status dan peranan, antara lain akan menyoroti ketegangan intern di dalam tubuh suatu *role-set*, yang disebabkan oleh perbedaan posisi, sikap, nilai, harapan, dan pandangan yang mencirikan tiap-tiap relasi interaksi.⁶

Sehubungan dengan peranan majelis taklim dalam tulisan ini adalah beberapa atau seperangkat fungsi majelis taklim dapat dijadikan mediator untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat Islam, terutama di desa Payabenua.

⁶ *Ibid.*, h. 60-62

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J. Cohen,⁷ juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

⁷ <http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf> (diakses 28 September 2017), h. 10-11

8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa :

- a. Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.⁸

2. Bahasa Peranan

Sebuah tipologi peran dapat menuntun seseorang pekerja masyarakat untuk berpikir tentang pekerjaan seandainya ia hanya mengerjakan satu hal pada suatu waktu. Seseorang berpikir atas dirinya sendiri, contohnya, sebagai seorang yang ‘berkedudukan’, seorang ‘organiser’, atau seorang ‘pendidik’, dan seperti bergerak dari satu peran spesifik ke peran lainnya. Bagaimanapun, realitas kerja masyarakat, dalam satu aktivitas, seorang pekerja masyarakat sering berpenampilan dengan tiga wajah peran pada satu waktu.⁹

⁸ *Ibid.*, h. 11-12

⁹ Jim Ife dan Frank Tesoriero, Penerj. Sastrawan Manullang, Nurul yakin, M. hursyahid, *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. Ke-2, h. 556

Sebuah pemisahan yang rigid atas berbagai peran bisa terlihat rapi dalam sebuah buku teks atau sebuah ruang kelas, namun hal itu jarang mencerminkan pada ketidaktepatan konteks praktik (mengingat konteks praktik itu berbeda-beda), dan hal itu dapat menuntun seorang pekerja masyarakat menciptakan suatu pembedaan suatu pembedaan artifisial.¹⁰

B. Majelis Taklim

1. Pengertian Majelis Taklim

Secara etimologis, kata ‘majelis taklim’ berasal dari bahasa Arab, yakni majlis dan taklim. Kata ‘*majlis*’ berasal dari kata *jalasa*, *yajlisu*, *julusan*, yang artinya duduk atau rapat. Selanjutnya kata ‘taklim’ sendiri berasal dari kata ‘alima ya’lamu, ‘ilman, yang artinya mengetahui sesuatu, ilmu, ilmu pengetahuan. Arti taklim menurut Mahmud Yunus melalui Kamus Arab Indonesia dalam Muhsin MK adalah hal *mengajar, melatih*,¹¹ yang menurut Adib Bisri melalui kamus Al-Bisri dalam Muhsin MK kata taklim berasal dari kata ‘*alama* ‘*allaman* yang artinya *mengecap, memberi tanda*, dan *ta’alam* berarti *terdidik, belajar*.¹² Dengan demikian, menurut Muhsin MK arti *majelis taklim* adalah *tempat mengajar, mendidik, tempat melatih*, atau *tempat belajar, tempat berlatih*, dan *tempat menuntut ilmu*.

Sedangkan secara terminologis, majelis taklim mengandung beberapa pengertian yang berbed-beda. Effendi Zarkasyi menyatakan, “*Majelis taklim bagian dari model dakwah dewasa ini dan sebagai forum*

¹⁰ *Ibid.*, h. 556-557

¹¹ Muhsin MK, *Manajemen Majelis Taklim Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya*, (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009), Cet. Ke-I, h. 1

¹² *Ibid.*

belajar untuk mencapai suatu tingkat pengetahuan agama,” Syamsudin Abbas juga mengemukakan pendapatnya, di mana ia mengartikannya sebagai “lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak.”

Kemudian Musyawarah Majelis Taklim Se-DKI pada tanggal 9-10 Juli 1980 merumuskan definisi (ta’rif) majelis taklim, yaitu *lembaga pendidikan Islam non-formal yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur serta diikuti peserta jamaah yang relatif banyak, dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan Allah Swt., (habluminallah), dan antara manusia dan sesama (habluminannaas) dan dengan lingkungan dalam rangka membina pribadi dan masyarakat bertakwa kepada Allah Swt.*¹³

Selain itu, sesuai dengan realitas dalam masyarakat, majelis taklim bisa juga diartikan sebagai tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan kegiatan belajar-mengajar (khususnya bagi kaum Muslimah) dalam mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya.¹⁴

¹³ *Ibid.*, h. 2

¹⁴ *Ibid.*

2. Fungsi dan Tujuan Majelis Taklim

Berkenaan dengan tujuan majelis taklim, Tuti Alawiyah merumuskan bahwa tujuan majelis taklim dari segi fungsi, yaitu: pertama, berfungsi sebagai tempat belajar, maka tujuan majelis taklim adalah menambah ilmu dan keyakinan agama yang akan mendorong pengalaman agama. kedua, berfungsi sebagai tempat kontak sosial, maka tujuannya adalah silaturahmi. Ketiga, berfungsi mewujudkan minat sosial, maka tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.¹⁵

Muhsin MK dalam bukunya manajemen majelis taklim tidak memisahkan antara tujuan dan fungsi majelis taklim. Apabila dilihat dari makna dan sejarah berdirinya majelis taklim dalam masyarakat, bisa diketahui dan dimungkinkan lembaga dakwah ini berfungsi dan bertujuan sebagai berikut.¹⁶

a. Tempat Belajar-Mengajar

Majelis taklim dapat berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar umat Islam, khususnya bagi kaum perempuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam. Menurut AM Saefudin dalam Muhsin MK, agar fungsi dan tujuan tadi tidak terlepas dari kewajiban kaum perempuan yang salehah dalam masyarakat, mereka diharapkan dapat memiliki hal-hal sebagai berikut:

¹⁵ Tuti Alawiyah, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*, (Bandung: Mizan, 2007), Cet. ke-5, h. 78

¹⁶ Muhsin MK, *Op.cit.*, h. 5

1. Memiliki akhlak yang karimah (mulia)
2. Meningkatkan ilmu dan kecerdasan dalam rangka mengangkat derajatnya.
3. Memperbanyak amal, gerak, dan perjuangan yang baik.

b. Lembaga Pendidikan dan Keterampilan

Majelis taklim juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan dalam masyarakat yang berhubungan, antara lain dengan masalah pengembangan kepribadian serta pembinaan keluarga dan rumah tangga sakinah warahmah. Muhammad Ali Hasyimi dalam Muhsin MK menyatakan, “wanita muslimah adalah tiang bagi keluarga muslim. AM Saefudin dalam Muhsin MK menyatakan salah satu kunci kemuliaan dan kehormatan rumah tangga terletak pada kaum perempuan, baik dia sebagai istri maupun sebagai ibu. Melalui Majelis taklim inilah, diharapkan mereka menjaga kemuliaan dan kehormatan keluarga dan rumah tangganya.¹⁷

c. Wadah Berkegiatan dan Berkreativitas

Majelis taklim juga berfungsi sebagai wadah berkegiatan dan berkreativitas bagi kaum perempuan. Antara lain dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasalnya menurut Mohammad Ali Al-Hasyimi, melalui bukunya *Kepribadian wanita muslimah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* dalam Muhsin MK

¹⁷ *Ibid.*, h. 6

menjelaskan bahwa, wanita muslimah juga mempunyai tugas seperti laki-laki sebagai pengemban risalah dalam kehidupan ini. Alhasil, mereka pun harus bersifat sosial dan aktif dalam masyarakat serta dapat memberi warna kehidupan mereka sendiri.

Sedangkan AM Saefudin dalam Muhsin MK menyatakan, bahwa negara dan bangsa kita sangat membutuhkan kehadiran perempuan yang salehah dengan keahlian dan keterampilan sehingga dengan kesalehan dan kemampuan tersebut dia dapat membimbing dan mengarahkan masyarakatnya kepada yang baik.¹⁸

D. Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Menurut AM Saefuddin majelis taklim juga berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia kaum perempuan dalam berbagai bidang seperti dakwah, pendidikan, sosial, dan politik yang sesuai dengan kodratnya. Dalam bidang dakwah dan pendidikan, majelis taklim diharapkan dapat meluluskan dan mewisuda pesertanya menjadi guru-guru dan juru dakwah baru. Sedangkan dalam bidang politi dan perjuangan, seperti dikemukakan oleh KH. Misbach, bahwa bil kaum Muslimat di zaman Rasulullh saw ikut berjuang sisabilillah, di zaman sekarang ini mereka juga diharapkan dapat melaksanakan kegiatan sosial dan politik di negerinya sendiri.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, h. 7

e. Jaringan Komunikasi, Ukhuwah dan Silaturahmi

Majelis taklim juga diharapkan menjadi jaringan komunikasi, ukhuwah, dan silaturahmi antarsesama kaum perempuan, antara lain dalam membangun masyarakat dan tatanan kehidupan yang islami. Menurut Syamsuddin Abbas, lewat lembaga ini diharapkan mereka yang kerap bertemu dan berkumpul dapat memperkokoh ukhuwah, mempererat tali silaturahmi, dan saling berkomunikasi sehingga dapat memecahkan berbagai masalah yang mereka hadapi dalam hidup dan kehidupan pribadi, keluarga, dan lingkungan masyarakatnya secara bersama-sama dan bekerja sama. Terlebih lagi, dalam mengatasi berbagai permasalahan berat yang tengah dihadapi oleh umat dan bangsa dewasa ini.²⁰

Jika kita perhatikan dengan teliti, penjelasan Muhsin MK di atas mengkhuskan majelis taklim yang pesertanya adalah dari kaum wanita. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kaum lelaki pun dapat mengadakan majelis taklim. Hanya saja di Jakarta dan sekitarnya mungkin lebih banyak dikenal majelis taklim yang banyak dari kaum wanita pesertanya.

Selanjutnya dalam ensiklopedia Islam, tujuan majelis taklim adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran beragama di kalangan masyarakat, khususnya bagi jamaah;
- b. Meningkatkan amal ibadah masyarakat;

²⁰ *Ibid.*

- c. Mempererat silaturahmi antar jamaah;
- d. Membina kader di kalangan umat Islam.²¹

3. Jenis Jenis Majelis Taklim

Menurut Muhsin MK, Majelis taklim yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia jika dikelompok-kelompokkan ada berbagai macam, antara lain:

a. Dilihat dari Jamaahnya

Bila dilihat dari jamaah atau anggota masyarakat yang mengikuti majelis taklim, ada beberapa macam sebagai berikut.

1. Majelis taklim kaum ibu/muslimah/perempuan
2. Majelis taklim kaum bapak/muslimin/laki-laki
3. Majelis taklim kaum remaja
4. Majelis taklim anak-anak
5. Majelis taklim campuran laki-laki dan perempuan/kaum bapak dan ibu²²

b. Dilihat dari Organisasinya

Jika dilihat dari kedudukan dan status organisasinya, majelis taklim juga ada beberapa macam, antara lain:

1. Majelis taklim biasa, dibentuk oleh masyarakat setempat tanpa memiliki legalitas formal kecuali hanya memberi tahu kepada lembaga pemerintahan setempat

²¹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam ed., Majelis, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Haeve, 2004), h.122.

2. Majelis taklim berbentuk yayasan, biasanya telah terdaftar dan memiliki akte notaries.
3. Majelis taklim berbentuk ormas
4. Majelis taklim di bawah ormas.
5. Majelis taklim di bawah orsospol.

c. Dilihat dari Tempatnya

Bila dilihat dari tempat yang digunakan dalam melaksanakan kegiatannya, majelis taklim ada beberapa macam, antara lain:

Dilihat dari tempatnya, majelis taklim terdiri dari:

- a. Majelis taklim masjid atau mushala
- b. Majelis taklim perkantoran
- c. Majelis taklim perhotelan
- d. Majelis taklim pabrik atau industri
- e. Majelis taklim perumahan²³

4. Peranan Majelis Taklim di Masyarakat

Keberadaan majelis taklim dalam masyarakat telah membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi kaum perempuan, apalagi bagi mereka yang menjadi anggota dan jamaahnya. Hal ini erat dengan kegiatan lembaga dakwah tersebut dalam masyarakat, mulai dari tingkat RT/RW hingga nasional, regional, dan global. Peran majelis taklim selama ini tidaklah terbatas. Bukan hanya untuk kepentingan dan

²³ Muhsin MK., *Opcit.*, h. 9-12

kehidupan jama'ah majelis taklim saja, melainkan juga untuk kaum perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan yang meliputi antara lain:

a. Pembinaan Keimanan Kaum Perempuan

Peran majelis taklim yang cukup dominan selama ini adalah dalam membina jiwa dan mental rohaniyah kaum perempuan sehingga sudah sekian banyak di antara mereka yang semakin taat beribadah, kuat imannya, dan aktif dalam berdakwah. Keadaan ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan majelis taklim yang senantiasa berhubungan dengan masalah agama, keimanan, dan ketakwaan, yang ditanamkan melalui taklim/pengajian secara intensif, rutin, dan berkelanjutan, yang diikuti oleh segenap jamaah dan pengurus majelis taklim yang sebagian besar kaum perempuan.²⁴

Agar majelis taklim lebih berperan dalam pembinaan keimanan jama'ah dan kaum perempuan dalam masyarakat, maka kegiatan pengajiannya yang sudah berjalan selama ini perlu lebih ditingkatkan lagi, baik dari segi intensitas dan kuantitasnya maupun dalam segi kualitasnya, terutama kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.*, h. 256

1. Materi Kajian

Materi kajian majelis taklim yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan perlu lebih diperbanyak dan diperdalam agar benar-benar dapat dipahami sedalam-dalamnya oleh jama'ah dan kaum perempuan yang mengikutinya. Pasalnya, selama ini kajian seperti ini dirasakan masih kurang dan terbatas diberikan dalam majelis taklim, sementara yang ada hanya kegiatan pengajian dalam bentuk ceramah keagamaan dari seorang ustadz/ustadzah dengan materi yang tidak sistematis dan terfokus.

2. Kitab Rujukan

Menurut Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan melalui bukunya Ilmu Tauhid dalam Muhsin MK memaparkan bahwa, Kitab rujukan untuk materi pembinaan keimanan perlu ditentukan yang benar-benar memberikan pemahaman tentang iman, akidah, dan tauhid secara murni, jelas, terarah, dan sah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Pasalnya, keduanya merupakan sumber yang orisinal dan utama dalam membahas tentang materi yang berkaitan dengan akidah, tauhid, dan keimanan.²⁵

²⁵ *Ibid.*, 257-258

3. Pemberi Materi Kajian

Pemberi materi keimanan dalam pengajian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan hendaklah ustadz/ustadzah yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan hanya sekadar menguasai sifat dua puluh. Sebab, sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an berjumlah sembilan puluh Sembilan. Mereka juga perlu menguasai tentang materi akidah, tauhid, dan keimanan yang benar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta buku-buku rujukan tadi, termasuk mengetahui tentang cabang-cabang iman.²⁶

b. Pendidikan Keluarga Sakinah

Terbentuknya keluarga sakinah merupakan dambaan setiap orang, terutama bagi pasangan yang sudah menikah dan berkeluarga, apalagi hal itu merupakan proses dan tujuan dari sebuah pernikahan dalam Islam. Majelis taklim dapat memainkan peran yang besar dalam membantu memecahkan masalah dan kesulitan suatu keluarga, terutama yang dihadapi oleh jama'ah majelis taklim, kaum perempuan, dan masyarakat dalam membentuk dan memnbangun suatu keluarga sakinah, bahagia, dan sejahtera.²⁷ Adapun yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.*, 259

²⁷ *Ibid.*,

1. Pengajian Keluarga Sakinah

Majelis taklim perlu mengadakan kegiatan pengajian dan ceramah agama dengan materi antara lain, yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga sakinah. Melalui pengajian dan ceramah ini dapat disampaikan oleh ustadz/ustadzah yang mengisinya tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah.

2. Mengadakan Konsultasi Keluarga

Majelis taklim juga perlu mengadakan kegiatan konsultasi masalah-masalah perkawinan dan keluarga, terutama dalam membantu memecahkan masalah pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, mendamaikan perselisihan di antara mereka berdua, mencegah terjadinya perceraian, dan usaha lainnya dalam rangka menjadikan mereka senang, tenang, dan bahagia dalam berkeluarga.

Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang selalu memberikan kesempatan kepada kaum Muslimah berkonsultasi, antara lain untuk menyampaikan masalah diri dan/ atau keluarganya, serta berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga keadaan diri dan keluarga mereka dalam keadaan sakinah dan baik pula.²⁸

²⁸ *Ibid.*, h. 260-261

3. Kegiatan Positif Lainnya

Dalam membentuk keluarga sakinah, majelis taklim juga perlu mengadakan kegiatan positif lainnya seperti kegiatan; keterampilan menjahit, penerangan masalah kecantikan, kesehatan fisik dan mental, masalah gizi dan makanan yang halal, masalah lingkungan hidup, usaha rumah tangga (home industry), pendidikan tulis baca Al-Qur'an, mabit bersama keluarga, pemilihan ibu teladan, seminar dan diskusi masalah keluarga dan sebagainya.

Semua kegiatan itu perlu menjadi agenda pengurus majelis taklim karena memberikan manfaat dan maslahat yang besar kepada kaum perempuan dalam masyarakat, terutama jamaah majelis taklim itu sendiri, untuk menunjang terbentuknya keluarga sakinah dan bahagia dalam rumah tangga mereka.²⁹

c. Pemberdayaan Kaum Du'afa

Majelis taklim memiliki peran yang besar, baik dalam memberikan bantuan sosial maupun yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi kaum du'afa tersebut. Di antara kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh majelis taklim dalam membantu menolong kaum du'afa adalah:

1. Penyantunan, pengasuhan, dan pendidikan anak yatim.
2. Santunan dan bantuan sosial kepada fakir miskin dan orang-orang yang terlantar.

²⁹ *Ibid.*, h. 262

3. Pemberian bantuan pangan dan obat-obatan untuk masyarakat yang mengalami musibah bencana alam.
4. Menghimpun zakat, infak, dan sedekah yang digunakan untuk kepentingan kaum du'afa.
5. Pembinaan dan pendidikan anak-anak jalanan dan pemberdayaan ekonomi.
6. Dakwah dan pembinaan rohani kepada orang sakit dan pelatihan keterampilan.
7. Pemberian beasiswa.
8. Khitanan dan perkawinan massal.³⁰

Bila majelis taklim dapat dipercaya sebagai Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah umat secara legal, perannya dapat lebih besar lagi di dalam membantu dan menolong kaum du'afa secara lebih baik. Manfaat yang lain, selain majelis taklim tidak mengalami kesulitan biaya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, juga dapat lebih banyak berperan dalam masyarakat, termasuk dalam memecahkan masalah dan pengembangan kaum duafa dalam masyarakat. Dalam menangani masalah kaum duafa ini, majelis taklim memiliki berbagai kelebihan dari lembaga dan organisasi dakwah yang lain, kelebihanannya antara lain:

1. Keberadaan majelis taklim dalam masyarakat telah berdiri di tingkat RT dan RW.
2. Majelis taklim lebih mengetahui keadaan kaum duafa
3. Majelis taklim mudah menarik simpati masyarakat
4. Pengurus dan jamaah majelis taklim kaum perempuan
5. Kerja sama majelis taklim dengan pengurus masjid³¹

³⁰ *Ibid.*, h. 263

³¹ *Ibid.*, 264-267

d. Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga

Sudah seharusnya majelis taklim berperan lebih besar dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga dan juga kaum perempuan yang ada dalam masyarakat. Majelis taklim selama ini belum berperan maksimal dalam masalah tersebut dan lebih terkesan justru memberatkan ekonomi rumah tangga jamaahnya dengan berbagai kegiatan yang bersifat konsumtif. Semisal, masalah pakaian seragam yang tiap tahun berganti-ganti serta melakukan wisata ziarah yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Oleh sebab itu, majelis taklim perlu membentuk dan mengadakan kegiatan ekonomi yang konkret seperti mendirikan koperasi dan BMT, yang di antaranya melakukan kegiatan simpan pinjam atau pinjam simpan dengan menggunakan sistem kekeluargaan dan bagi hasil. Melalui lembaga ini diharapkan lebih berhasil dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga jamaah dan pengurusnya, sekalipun belum dapat memberikan bantuan yang besar. Lembaga semacam ini perlu sekali didirikan dan dikembangkannya dalam masyarakat dan perlu pula didukung oleh manajemen yang profesional, SDM yang andal, dan permodalan yang memadai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berhasil.³²

Berdirinya BMT majelis taklim ini diharapkan menjadi sebuah proses kegiatan di bidang usaha dalam membantu meningkatkan

³² *Ibid.*, h. 267-268

ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan jamaah majelis taklim khususnya dan kaum perempuan dalam masyarakat pada umumnya. Kaum perempuan dan jamaah majelis taklim diharapkan tidak hanya menjadi anggota BMT semata, melainkan juga memiliki kemampuan antara lain dalam mengembangkan industri rumah tangga dengan modal yang dipinjamkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut.

Dengan adanya kegiatan industri rumahan ini diharapkan kehidupan dan keadaan ekonomi rumah tangga masyarakat menjadi lebih baik di masa depan. Pengaruhnya pada girinnya pula dapat dirasakan oleh pihak BMT majelis taklim yang memberikan pinjaman modal, yaitu berupa penambahan keuntungan. Bila keadaan ekonomi rumah tangga jamaah majelis taklim dan kaum perempuan yang ada dalam masyarakat menjadi lebih baik, diharapkan kemiskinan menjadi berkurang. Di sini, BMT benar-benar menjadi sarana strategis dalam proses pengentasan kemiskinan. Ahmad Zaki Yamani melalui bukunya *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini dalam Muhsin MK* menjelaskan, dengan sedekah, infak, dan zakat ini diharapkan majelis taklim dapat memanfaatkannya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat lingkungannya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tidak heran, pada zaman pemerintahannya tidak ada seorang pun yang mau menerima harta zakat.³³

³³ *Ibid.*, h. 268

Bila harta zakat dari umat yang berharta itu diserahkan kepada BMT majelis taklim untuk mengelolanya secara profesional, lembaga keuangan syari'ah itu dapat lebih berperan, yaitu dalam bentuk:

1. Membangun ekonomi rumah tangga jamaah majelis taklim dan umat Islam dalam masyarakat.
2. Menurut Saefuddin dalam Muhsin Mk, yaitu menanggulangi masalah sosial ekonomi dan keuangan masyarakat lingkungannya
3. Menurut Muhsin melalui bukunya Menyayangi Duafa dalam Muhsin MK, yaitu memberikan jaminan sosial kepada kaum du'afa untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapinya.³⁴

e. Pemberdayaan Politik Kaum Perempuan

Majelis taklim mempunyai peran politik yang cukup strategis. Jamaah dan kaum perempuan yang mengikuti kegiatan majelis taklim diharapkan semakin lama semakin cerdas, dewasa, dan paham tentang berbagai masalah politik yang terjadi di daerah dan negerinya. Alhasil, akhirnya mereka dapat membedakan mana partai politik dan pejabat publik yang baik dan bersih dan mana yang kotor dan buruk. Mereka belajar secara langsung dari proses dan kenyataan yang terjadi dalam setiap pemilu.³⁵

³⁴ *Ibid.*, 268-269

³⁵ *Ibid.*, h. 270

Di sinilah letak peran majelis taklim dalam pemberdayaan politik kaum perempuan dan jamaah taklim umumnya. Peran yang dijalankannya bukanlah karena lembaga dakwah ini telah bermain politik praktis mengingat hal ini bertentangan dengan jiwa dan semangat majelis taklim yang harus bersikap netral dan bebas. Sikap berpihak dan ketergantungannya kepada Allah SWT, Rasul-Nya, Islam, persatuan umat, dan dakwah. Peran politik majelis taklim ini besar pengaruhnya dalam proses memberikan kesadaran, pengetahuan, dan wawasan politik, khususnya kepada jamaah dan umumnya kepada kaum perempuan dalam masyarakat.³⁶

C. Pemberdayaan Masyarakat Islam

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Islam

Istilah pemberdayaan dalam Oxford English Dictionary adalah terjemahan dari kata *empower* yang mengandung dua pengertian: (i) *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain), (ii) *to give ability to, enable* (usaha untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan

³⁶ *Ibid.*

martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.³⁷

Pengertian pemberdayaan seperti ini sesuai dengan definisi yang diberikan Tantan Hermansyah, dkk., yang menyebutkan “pemberdayaan adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya serta mampu menyelesaikannya.”³⁸

Meskipun belum ada kesepakatan dan pengertian yang baku tentang pemberdayaan masyarakat atau yang secara umum juga dikenal dengan *community empowerment*, nampaknya cukup penting dan berguna untuk mengadopsi pengertian pemberdayaan masyarakat yang dirilis oleh Tim Deliveri dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato sebagai salah satu acuan, yaitu: *pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin.*³⁹

Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*). Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu

³⁷ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), *Ibid.*, h. 17-18

³⁸ Ahmad Rifai'i, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Studi Kasus di Masjid Al-Ikhlash Jatipadang Pasar Minggu, Jakarta Selatan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27142/1/AHMAD%20RIFA%27I-FDK.pdf> (diakses 23 Oktober 2017), h. 26

³⁹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 76

keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.⁴⁰

Kemudian menurut Edi Suharto dalam Ahmad Rifa'i mendefinisikan pemberdayaan atau pemberkuasaan (Empowerment), berasal dari kata "power" (kekuasaan atau keberdayaan). Oleh karenanya, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung. Dalam hal ini bagaimana orang-orang yang kurang berdaya dan kurang beruntung tadi agar dapat berdaya dan berkuasa untuk menolong dirinya sendiri.⁴¹ Kemudian menurut Jim Ife dalam Ahmad Rifa'i, "pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan keahlian dari masyarakat dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri." Sedangkan menurut Manuwuto, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pada suatu waktu tidak atau belum mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membuat mampu dan mandiri suatu kelompok masyarakat."⁴²

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ahmad Rifa'i, *Op.cit*, h. 25

⁴² *Ibid.*, h. 25-26

Tantan Hermansyah dkk, menyebutkan Pemberdayaan masyarakat Islam merupakan bagian dari dakwah. Tetapi kegiatan dakwah yang sudah mengalami perubahan paradigma. Paradigma dakwah konvensional yang masih berfokus kepada ibadah vertikal. Paradigma dakwahnya lebih kepada perubahan sosial secara nyata, yakni hubungan vertikal sekaligus hubungan horizontal.⁴³

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan Pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut⁴⁴:

1. Perbaikan pendidikan (better education) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup;
2. Perbaikan aksesibilitas (better accessibility)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitinya, utamanya tentang

⁴³ Tantan Hermansyah, et.al., Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam, dalam Ahmad Rifa'i, *Ibid.*, h. 26

⁴⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Ibid.*, h. 111-112

aksesibilitas dengan informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran;

3. Perbaikan tindakan (better action)

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;

4. Perbaikan kelembagaan (better institution)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha;

5. Perbaikan usaha (better business)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;

6. Perbaikan pendapatan (better income)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya;

7. Perbaikan lingkungan (better environment)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;

8. Perbaiki kehidupan (better living)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;

9. Perbaiki masyarakat (better community)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan "mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri" atau "membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri". Hal ini berarti bahwa di dalam proses pemberdayaan yang terjadi, masyarakat berperan secara aktif didalam mendesain dan merancang bentuk pemberdayaan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Dengan demikian akan dicapai satu hasil pemberdayaan masyarakat dalam

bentuk masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan.⁴⁵

3. Lingkup dan Tahapan Kegiatan Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah ”proses menjadi”, bukan ”proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.⁴⁶ Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat bottom up yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Tahapan selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera. Dalam kata mandiri telah terkandung pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain.⁴⁷

Burton E. Swanson mengemukakan, langkah-langkah strategi operasional yang harus ditempuh dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah: *Getting to know the local community, Gathering knowledge about the local community, Identifying the local leaders, Stimulating the*

⁴⁵ Bab II, Kajian Teoritik, <http://digilib.uinsby.ac.id/7153/2/Bab%202.pdf>, (diakses 8 Juni 2017), h. 14

⁴⁶ Budi Azwar, *Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar (Studi Tentang Efektifitas Bantuan Dana Bergulir Sektor Agribisnis)*, (UIN Suska Riau, Menara Riau : Jurnal Kewirausahaan, Vol 13, No.1, Januari- Juni 2014), <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/download/845/805> (diakses 28 Juli 2017), h. 105

⁴⁷ *Ibid.*, h. 106

community to realize that it has problems, Helping people to discuss their problem, Helping people to identify their most pressing problems, Fostering self-confidence, Deciding on a program action, Recognition of strengths and resources, Helping people to continue to work on solving their problems, Increasing people's ability for self-help. Helping people to discuss their problem. Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.⁴⁸

Ketika kegiatan pemberdayaan masyarakat belum berhasil meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru seperti yang diharapkan, maka yang paling penting dikaji adalah menemukan apa dan di mana akar permasalahannya. Pengetahuan tentang akar permasalahan ini, membantu untuk merumuskan suatu strategi pemecahan masalah yang lebih tepat dan efektif. Merumuskan suatu pola pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang tergolong miskin adalah pekerjaan rumit. Rumit, karena karakteristik yang mereka miliki berbeda. Dan setiap perbedaan menuntut pola pemberdayaan yang berbeda. Semua kekuatan, kelemahan, dan permasalahan yang ada perlu diidentifikasi dengan cermat, terutama yang berhubungan dengan pola pikir mereka yang tradisional, sulit melakukan perubahan. Keadaan seperti ini terjadi karena rendahnya perhatian pemerintah terhadap pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa dan negara. *Core idea* dari implementasi otonomi

⁴⁸ *Ibid.*, h. 15-16

daerah adalah tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, sedangkan peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat.⁴⁹

Sumodiningrat dan Gunawan dalam Agus Purbathin Hadi mengemukakan bahwa, jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.⁵⁰

Lebih lanjut menurut Sumodiningrat dan Gunawan dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu; *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

⁴⁹ *Ibid.*, h. 14-15

⁵⁰ Agus Purbathin Hadi, *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan*, Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), (diakses 8 Juni 2017)

berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah.⁵¹ Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu,

⁵¹ *Ibid.*

pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.⁵²

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.⁵³

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

4. Konsep Pemberdayaan Perspektif Islam

a. Islam Agama pemberdayaan

Pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Istilah “pemberdayaan” adalah terjemahan dari istilah asing empowerment. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.⁵⁴

Secara terminologis, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*usrah*), kelompok sosial (*jama'ah*), dan masyarakat (ummah). Imang Mansur Burhan Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.⁵⁵

Selanjutnya proto-type masyarakat dengan ciri “tidak berdaya” sudah jelas tergambar dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Istilah

⁵⁴ Nanih Machendrawaty, dan, Agus Ahmad Safei, *Op.cit.*, h. 41-42

⁵⁵ *Ibid*, h. 42

pemberdayaan; baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah adalah sebagai berikut.

Kata Tamkîn dalam kamus-kamus bahasa merupakan bentuk mashdar dari fi'il (kata kerja) makkana. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan kata amkana. Kata مَكَّنْ berkaitan dengan dengan kata المَكْن dan المَكِن. Penulis al-Muhith fî al-Lughah dalam Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik mengatakan:

المَكِنُ والمَكْنُ بَيَضُ الضَّبِّ ضَبَّةٌ مَكُونٌ وَفِي الْحَدِيثِ أَقْرُوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا وَ مَكْنَاتِهَا أَي عَشِيهَا وَأَمَكِنَتْهَا

(المَكِن dan المَكْن berarti telur biawak herbivora, telur yang tesimpan di suatu tempat). Dalam hadis disebutkan, “biarkan burung itu hidup dalam sangkarnya atau tempat tinggalnya.”⁵⁶

Selanjutnya Al-Jauhari dalam Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik membawakan arti lain dari kata مَكَّنْ yaitu:

مَكَّنَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْءِ وَأَمَكَّنَهُ مِنْهُ بِمَعْنَى وَاسْتَمَكَّنَ الرَّجُلُ مِنَ الشَّيْءِ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ، بِمَعْنَى وَقُلَانٌ لَا يُمَكِّنُهُ التُّهُؤُضُ أَي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ

“Allah memberikan kekuasaan dan menguatkannya atas sesuatu. Maksudnya orang tersebut memiliki kedudukan atau kekuasaan atau pengaruh atas sesuatu. Atau orang itu memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu.”⁵⁷

Kemudian menurut Ibnu Darid mengatakan :

لِفُلَانٍ مَكَانَةٌ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَي مَنزِلَةٌ

“Fulan memiliki makanah di sisi penguasa artinya ia memiliki kedudukan.”

⁵⁶ Yulizar D. Sanrego, Moch. Taufik, Fiqih Tamkin Fiqih Pemberdayaan Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), Cet. Ke-1, h. 74-75

⁵⁷ *Ibid*, h. 75-76

Dengan demikian kata *tamkîn* menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu, kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan memiliki kedudukan atau tempat; baik itu berifat *hissi* (dapat dirasakan/materi) seperti menetapnya burung dalam sangkarnya atau bisa bersifat *ma'nawi* seperti kokohnya atau teguhnya orang tersebut di sisi penguasa.⁵⁸

b. Kompleks Pemberdayaan

Model pemberdayaan dalam pendapat Muhammad Thalhah Hasan, mengacu kepada tiga potensi dasar manusia, antara lain: potensi jism (fisik), potensi *akal* dan potensi *kalbu*.⁵⁹ Menurut Agus Efendi, setidaknya ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks keumatan masa kini, yakni pemberdayaan dalam tataran ruhaniah, intelektual, dan ekonomi.⁶⁰

Pertama, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Dalam pandangan Agus efendi, degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam saat ini sangat mengguncang kesadaran Islam. Kepribadian Kaum Muslim terutama mayoritas generasi mudanya begitu telanjang terkooptasi oleh budaya negatif Barat yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam. Hal ini juga diperparah dengan gagalnya pendidikan agama di hampir semua lini pendidikan.

⁵⁸ *Ibid*, h. 76

⁵⁹ Wendy Melfa, Solihin Siddiq, *Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Bandar Lampung: Matakata, 2007), Cet. Ke- 2, h. 129

⁶⁰ Nanih Machendrawaty, dan, Agus Ahmad Safei, *Op.cit.*, h. 44

Untuk keluar dari belitan persoalan, ini masyarakat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan desain besar kurikulum pendidikan untuk setiap wilayah pendidikan, yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiah, yang tidak bertentangan dengan perjuangan kebenaran ilmiah dan kemodernan.⁶¹

Kedua, pemberdayaan intelektual. Dengan sangat telanjang dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia bahkan di mana pun sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan teknologi. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar (jihad). Untuk itu, dalam konteks jurisprudensi tanggung jawab sosial Islam, menurut Agus Efendi, masyarakat Islam harus berani mengedepankan jargon teologi sosial, di bawah ini:

1. Bahwa malas belajar adalah dosa besar sosial Islam.
2. Bahwa pemberdayaan intelektual harus merupakan gerakan semua lini keumatan.
3. Bahwa setiap dukungan terhadap gerakan pemberdayaan intelektual harus dipandang sebagai jihad besar yang harus diakselerasikan.
4. Bahwa pada tataran manajemen operasional, masyarakat Islam, terutama mereka yang berkecimpung dalam wilayah manajemen korporasi keumatan, harus siap menghadapi gelombang *reengineering* yang berorientasi pada sistem manajemen keunggulan, yang boleh jadi harus meninggalkan pola-pola manajemen dan kepemimpinan yang tidak efektif, efisien, dan produktif untuk diganti dengan pola-pola manajemen kepemimpinan profesional dan

⁶¹ *Ibid.*

strategis. Penolakan terhadap gerakan ini harus dinilai sebagai hambatan-hambatan paling nyata terhadap gerakan pemberdayaan intelektual masyarakat Islam.

5. Bahwa untuk menjalankan ideal-ideal di atas, diperlukan gerakan aksional penggalan dan penghimpunan kekuatan-kekuatan ekonomis secara *by design*, yang diupayakan oleh setiap komponen umat bersama-sama masyarakat Islam, dengan sistem manajemen yang transparan dan profesional.⁶²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia intelektual adalah cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan; (yang) mempunyai kecerdasan tinggi; cendekiawan; totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman.⁶³ Menurut Gunarsa Intelektual merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.⁶⁴

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Masalah kemiskinan menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam di Indonesia. Pemecahannya, adalah tanggung jawab masyarakat Islam sendiri, yang selama ini selalu terpinggirkan. Dalam konteks ekonomis, seorang putra Islam dan generasi Qurani awal terbaik, sayyidina Ali mengatakan, “*sekiranya kefakiran itu berwujud seorang manusia, sungguh aku akan membunuhnya.*” Situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan

⁶² *Ibid.*, h. 44-45

⁶³ <https://kbbi.web.id/intelektual>, (diakses 12 Februari 2018)

⁶⁴ <http://generasi-intelektual.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-intelektual.html>, (diakses 12 Februari 2018)

untuk diratapi, melainkan untuk dicarikh jalan pemecahannya. Untuk keluar dari himpitan ekonomis ini, diperlukan perjuangan besar dan gigih dari setiap komponen umat. Setiap pribadi Muslim ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, berkreasi, dan berwirausaha (*enterpreneurship*); lebih *win-win* dalam bekerja sama, komunikatif dalam berinteraksi; lebih *skillful* dalam memfasilitasi jaringan kerja, dan lebih profesional dalam mengelola potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan riil ekonomi umat.⁶⁵ Untuk bisa keluar dari himpitan situasi ekonomi seperti sekarang, disamping penguasaan terhadap *life skill* atau keahlian hidup, keterampilan berwirausaha, dibutuhkan juga pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang selama ini tidak pernah dilirik.⁶⁶

5. Pengertian Masyarakat Islam

Konsep Islam tentang masyarakat, telah dikaji secara meluas dan mendalam oleh para ilmuan dengan membutuhkan waktu yang panjang dan dirumuskan secara ilmiah dengan berpijak kepada dasaar-dasar ilmiah dan ilmu keislaman yang berdasarkan realitas sosial.

Masyarakat Islam terdiri dari dua kata yaitu masyarakat dan Islam. Secara epistemologis, kata masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syarikat yang berarti bersekutu. Abu Luis dengan karyanya Al-Munjid Fillughoh wal ‘Alam dalam Wendy Melfa dan Solihin Siddiq melalui

⁶⁵ Nanih Machendrawaty, dan, Agus Ahmad Safei, *Op.cit.*, h. 45

⁶⁶ *Ibid*, h. 45

bukunya Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun memaparkan, kata syarikat berasal dari kata syarika (fi'il madhi), yasroku (fi'il mudhari'), syarikan/syarikah (masdar).⁶⁷ Namun kata ini tersimpul unsur pengertian yang berhubungan dengan pembentukan suatu kelompok, golongan atau kumpulan. Dan kata masyarakat lebih bermakna kepada pergaulan hidup serta hubungan manusia dan kehidupan dan kehidupan kelompok manusia, yang dalam bahasa Arab menurut Abu Luis dalam Wendy Melfa dan Solihin Siddiq diterjemahkan dengan kata al-Mujtama' dan dalam bahasa Inggris menurut Peter Salim dengan karyanya The Contemporary English Indonesian Dictionary dalam Wendy Melfa dan Solihin Siddiq diartikan dengan society. Ralph Thomlinson melalui bukunya Sociological Concepts and Research dalam Wendy Melfa dan Solihin Siddiq memaparkan, masyarakat atau society is a large, continuing, organized group of people, it is the fundamental large-scale human group.⁶⁸

Pengertian masyarakat dinyatakan sebagai kelompok yang membentuk suatu keseluruhan dan menunjukkan hubungan manusia serta nilai – nilai sosial. Menurut Soekanto, masyarakat adalah warga suatu desa, kota, suku, atau bangsa yang membentuk suatu kelompok baik itu kelompok besar atau kecil yang hidup bersama sedemikian rupa, sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama kelompok inilah yang disebut dengan masyarakat. Dan

⁶⁷ Wendy Melfa, Solihin Siddiq, *Op.cit.*, 2, h. 1

⁶⁸ *Ibid.*, h. 2

masyarakat juga sering di artikan dengan suatu wilayah kehidupan sosial yang di tandai suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar masyarakat adalah lokalitas dan perasaan yang sama.⁶⁹

Dalam mengadakan klasifikasi masyarakat Soekanto menggunakan empat kriteria yang saling berpautan diantaranya :

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas kekayaan dan kepadatan penduduk
- c. Fungsi – fungsi masyarakat
- d. Organisasi⁷⁰

Arti masyarakat Islam dengan mengadopsi definisi masyarakat dari Gillin & Gillin, adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam.⁷¹ Menurut Agus Efendi dalam Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam kajian sosiologi, masyarakat Islam dibedakan dari segi identitas keagamaan masyarakat serta tradisi agama Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷² Ali Syari'ati menggunakan term *ummah* untuk mensubsitusi terminologi masyarakat Islam. Bagi Syari'ati, *ummah* tidak lain adalah masyarakat yang hijrah, yang satu sama lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan. Dalam pengertian yang lebih generik, *ummah* dipandang sebagai persaudaraan Islam, seluruh masyarakat Muslim. Yang

⁶⁹ <http://repository.uin-suska.ac.id/2849/3/BAB%20II.pdf>, (diakses 20 Oktober 2017), h. 21-22

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Nanih Machendrawaty, dan Agus Ahmad Safei ed., *Op.cit.*, h. 5

⁷² *Ibid.*, h. 6

memperhatikan kaum Muslim menjadi satu kesatuan adalah kesamaan pandangan dunia (*dîn*), yang didasarkan kepada sebuah gagasan universal (*tauhid*) dan sejumlah tujuan bersama: mencari keadilan (*'adl*) dan ilmu (*'ilm*) dalam upaya memenuhi kewajiban sebagai pengembangan amanah (*khilafah*) Tuhan.⁷³

Pemahaman terhadap terma masyarakat Islam atau *ummah* dalam terminologi Syari'ati dapat dipahami melalui dua sisi, yakni masyarakat Islam secara konseptual dan masyarakat Islam secara faktual. Secara konseptual, masyarakat Islam adalah masyarakat ideal yang hendak diwujudkan dengan berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Adapun secara faktual, masyarakat Islam didefinisikan sebagai masyarakat yang secara nyata ada dalam suatu kelompok manusia yang beragama Islam dengan sejumlah indikasi yang diberikan oleh Gillin and Gillin di atas yakni memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama seperti halnya masyarakat Islam yang menjadi mayoritas penghuni bangsa ini.⁷⁴

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang mengupas permasalahan hampir sama dengan penelitian ini, diantaranya terdapat dalam tesis Maturidi, yang berjudul *Peranan Majelis Taklim dalam Mengembangkan Masyarakat Islam di Kecamatan Bukit Kemuning*. Secara umum penelitian ini bertujuan

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, h. 8

Mendeskripsikan peranan Majelis Taklim Roudhatul Ummahat dalam pengembangan masyarakat Islam dan pelaksanaan ibadah ibu-ibu warga Lingkungan X Tanjung Balam Kecamatan Bukit Kemuning. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan masyarakat Islam dan pelaksanaan ibadah ibu-ibu warga Lingkungan X Tanjung Balam Kecamatan Bukit Kemuning.⁷⁵

Kesimpulan dari hasil penelitian Peranan majlis taklim dalam pengembangan masyarakat Islam dengan adanya kesenian Islami rebanahan, dan iuran kurban pada setiap tahunnya, kemudian terbentuknya rukun kematian ibu-ibu pengajian majelis taklim rodhatulummahat. Majelis Taklim Roudhatul Ummahat sebagai sebuah lembaga pendidikan non-formal banyak mempunyai peranan dalam masyarakatnya. Memberikan wawasan keberagaman yang luas, mempererat tali silaturrahim antar sesama muslim, menciptakan masyarakat yang bertaqwa serta memiliki akhlaqul karimah, membentuk pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Dari keterangan penelitian di atas, terdapat kesamaan penelitian ini, yakni kesamaan fokus objek penelitian mengenai majelis taklim dan kesamaan dalam teknik dalam pengumpulan data. Lalu, perbedaannya terletak pada tempat penelitian (*locus*), rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

⁷⁵ Maturidi, *Peranan Majelis Taklim dalam Mengembangkan Masyarakat Islam di Kecamatan Bukit Kemuning*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 24